



**PUTUSAN  
Nomor 2146 B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5846/PJ/2022, tanggal 6 Juli 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SINAR MUTIARA NUSANTARA**, beralamat di Pangkalan Kerinci RT 001, RW 09, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Alamat korespondensi Jalan Teluk Betung Nomor 31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, yang diwakili oleh Dian Novarina, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010197.18/2020/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 18 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Membatalkan surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00181/KEB/WPJ.02/2020, tanggal 15 Mei 2020; dan
2. Menerima seluruhnya permohonan banding yang Pemohon Banding

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2146/B/PK/Pjk/2024



ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Luas Bumi (m <sup>2</sup> )	328.300.000
NJOP Bumi/m <sup>2</sup> (Rp)	
Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	0
NJOP Bangunan /m <sup>2</sup> (Rp)	0
Total NJOP Bumi	0
Total NJOP Bangunan	0
Total NJOP	0
NJOPTKP	12.000.000
NJOP untuk Penghitungan PBB	0
NJKP (40%)	0
PBB Terutang (0,5%)	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010197.18/2020/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 18 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00181/KEB/WPJ.02/2020, tanggal 15 Mei 2020 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun Pajak 2019 Nomor Objek Pajak 14.04.041.222.210-0041.2 atas nama PT Sinar Mutiara Nusantara, NPWP 02.383.144.9-216.000, beralamat di Pangkalan Kerinci RT 001 RW 09, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Alamat korespondensi Jalan Teluk Betung Nomor 31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Pajak	Luas (m <sup>2</sup> )	Kelas	NJOP Per m <sup>2</sup> (Rp)	Total NJOP (Rp)
Bumi	328.300.000	197	230,00	75.509.000.000,00
Bangunan	0	0	0	0,00
Total NJOP				75.509.000.000,00

## Perhitungan PBB Terutang

1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	75.509.000.000,00
2. NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	12.000.000,00
3. NJOP untuk perhitungan PBB	75.497.000.000,00
4. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	40%
5. NJKP sebagai Dasar Perhitungan PBB (Angka 3 x Angka 4)	30.198.800.000,00
6. PBB yang terhutang (Tarif 0,5% x Angka 6)	150.994.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juli 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010197.18/2020/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 18 April 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2146/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010197.18/2020/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 18 April 2022, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00181/KEB/WPJ.02/2020, tanggal 15 Mei 2020 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun Pajak 2019 Nomor Objek Pajak 14.04.041.222.210-0041.2 atas nama PT Sinar Mutiara Nusantara, NPWP 02.383.144.9-216.000, beralamat di Pangkalan Kerinci RT 001 RW 09, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Alamat korespondensi Jalan Teluk Betung Nomor 31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun Pajak 2019 Nomor Objek Pajak 14.04.041.222.210-0041.2 atas nama PT Sinar Mutiara Nusantara, NPWP 02.383.144.9-216.000, beralamat di Pangkalan Kerinci RT 001 RW 09, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Alamat korespondensi Jalan Teluk Betung Nomor 31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 September 2022 yang pada intinya putusan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2146/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:
- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kondisi obyek dalam keadaan per 1 Januari Tahun yang bersangkutan, sehingga perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan Klasifikasi Nasional dengan Klas 197 dengan NJOP ditetapkan sebesar Rp230,00,00 per m<sup>2</sup> adalah sudah tepat. Karena tidak terdapat peningkatan biaya yang besar (signifikan) untuk memperoleh dan memelihara areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), sehingga tidak terdapat perubahan klasifikasi NJOP PBB tahun 2019 dengan tahun sebelumnya. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 8 ayat (2)

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2146/B/PK/Pjk/2024



dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2146/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2146/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)